



► KEBERAGAMAN

Menanti Jogja Istimewa dengan Pendidikan Inklusi

Belum semua difabel bisa belajar secara layak di sekolah inklusi di Bumi Mataram. Guru pendamping khusus masih minim. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Lugas Subarkah.

Kepala SDN Bangunrejo 2 Kota Jogja, Subagyo, merasakan bagaimana jumlah guru pendamping khusus (GPK) yang ada saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan. Di sekolah yang kerap dijadikan rujukan siswa difabel ini, lebih dari 50% peserta didiknya adalah penyandang disabilitas *slow learner*.

Dengan 69 siswa di sekolah ini, hanya terdapat empat GPK. Padahal, di setiap kelas terdapat siswa difabel. Idealnya, di satu kelas ada setidaknya satu GPK. "Sebenarnya kurang dua. Karena di sini banyak difabelnya," kata dia, Kamis (21/10).

Selain minimnya GPK, Subagyo juga mengakui belum semua difabel bisa masuk SDN Bangunrejo 2. Difabel yang bersekolah di SD tersebut sebatas *slow learner* dan difabel daksa.

SDN Bangunrejo 2 belum bisa melayani difabel netra, *down syndrom*, dan tuli berat. "Kami belum bisa

mengajar difabel netra menggunakan huruf braille. Kalau tuna daksa masih bisa," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, mengatakan pendidikan bagi difabel di DIY belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Ia mencontohkan fasilitas sekolah inklusi untuk difabel yang cukup berat seperti *cerebral palsy*, penjaminan pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan akses terhadap fasilitas publik. Penyebabnya macam-macam, mulai dari sosialisasi ketentuan pelayanan difabel, pemahaman mengenai masalah ini, sampai dengan penganggaran.

BAGIAN TERAKHIR

"Kami mengusulkan penganggaran difabel bisa menggunakan dana keistimewaan," ujarnya, Jumat (22/10).

Penggunaan dana keistimewaan penting karena APBD untuk difabel masih kecil. Dana keistimewaan diharapkan bisa meningkatkan secara signifikan berbagai program penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak difabel.

► Halaman 11



Sejumlah siswa difabel *slow learner* mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN Bangunrejo 2, Selasa (9/11).

Menanti Jogja...

Apalagi pada 2024 mendatang, Pemda DIY menargetkan Jogja sebagai wilayah yang ramah bagi difabel.

Di tengah belum maksimalnya implementasi sekolah inklusi ini, DPRD DIY akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Khusus. Rancangan peraturan mengatur sejumlah poin tentang penyelenggaraan pendidikan khusus atau SLB bagi difabel.

Raperda ini penting segera disahkan untuk penganggaran pada pendidikan khusus. "Kalau tidak ada perdanya, kami tidak bisa menganggarkan," katanya.

Meski kelak Pemda DIY akan membiayai pendidikan khusus melalui perda, pendidikan inklusi tetap harus diperkuat. Pendidikan khusus dan pendidikan inklusi mesti berjalan saling melengkapi.

Raperda ini sebelumnya direncanakan disahkan pada 24 September lalu. Namun sehari sebelum pengesahan, Komite Disabilitas DIY bersama sejumlah organisasi difabel beraudiensi dengan DPRD DIY untuk mengajukan keberatan. Mereka menilai Raperda Pendidikan Khusus merupakan langkah mundur Pemda DIY yang sebelumnya telah mencanangkan pendidikan inklusi.

Audiensi tersebut berakhir dengan kesepakatan pengesahan Raperda Pendidikan Khusus diundur dan Komite Disabilitas DIY akan memberikan draf

masukan. Mereka diberi waktu hingga November untuk menyerahkan masukan itu.

Ketua Komite Disabilitas DIY, Farid B. Siswanto, memberikan catatan atas raperda tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, pendidikan bagi difabel semestinya adalah pendidikan inklusi.

Di tingkat lokal, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta difabel cukup diatur Perda DIY No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang saat ini juga sedang direvisi. Tentunya dengan semangat dan prinsip untuk pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi, kata dia, bukan pendidikan yang eksklusif seperti sekolah luar biasa (SLB). Istilah untuk pendidikan khusus itu umumnya dipahami sebagai pendidikan luar biasa. Artinya anak difabel diberi pengajaran khusus di sekolah khusus yang terpisah dengan yang lain. "Itu tidak sejalan dengan paradigma inklusi," ujarnya, Senin (18/10).

Fasilitas & Stigma

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY, Ratna Dewi Setianingsih, mengakui masih banyak difabel yang belum mendapat fasilitas yang baik di sekolah inklusi. Beberapa persoalan yang menonjol adalah minimnya layanan GPK dan masih adanya

stigma dari tenaga pendidik terhadap difabel.

Ia mencontohkan satu sekolah di Sleman yang mendatangkan GPK dari SLB hanya dua hari dalam sepekan. GPK ini bertugas mendampingi difabel *cerebral palsy*. Akibatnya, pada empat hari ketika GPK tidak datang, siswa difabel tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik.

Selain itu, masih banyak sekolah yang sudah menyediakan toilet duduk tetapi pintu kamar mandinya masih sempit sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna kursi roda.

Menurutnya, kebanyakan sekolah baru menyediakan fasilitas yang aksesibel ketika ada difabel yang diterima sekolah tersebut. "Padahal seharusnya ada atau tidak ada difabel, sekolah tetap harus menyediakan fasilitas yang aksesibel," ungkapnya, Minggu (7/11).

Persoalan kedua adalah pelabelan, khususnya dari tenaga pendidik yang belum memiliki perspektif inklusi. Ini menyebabkan difabel tidak nyaman berada di sekolah reguler. "Ini membuat siswa difabel minder, ketinggalan dengan teman-temannya," katanya.

Jika siswa difabel ini diberi fasilitas sesuai kebutuhan, mereka tentu akan bisa belajar dengan baik. "Kuncinya ada pada guru pendamping khusus yang memadai. Ini menjadi PR, agar sekolah inklusi bisa berjalan dengan baik," ujarnya,

(lugas@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005